

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU :

- Abdul Kohar, Notaris dalam Praktek Hukum, Bandung : Alumni, 1983.
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Gunardi dan Markus Gunawan, Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan : Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Komar Andasasmita, Notaris I, Bandung : Sumur Bandung, 1981.
- Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Offset. 1994
- Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT.Ichtiar baru Van Hoeve,2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Departemen Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 14A/HUK/2006 tentang “Izin Undian”.

Departemen Sosial, Keputusan Menteri Sosial No 73/HUK/2002 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis”.

Indonesia. Kode Etik Notaris, Keputusan Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung tahun 2005

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan Atas Undian Berhadiah, Nomor 132 tahun 2000.

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Undian, UU No.22 tahun 1954, LN No. 75 Tahun 2004, TLN No. 623.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.28 tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2000, TLN No. 4740.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, UU No.36 tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893.

Indonesia, Keputusan Presiden No 48 tahun 1973 tentang “Penertiban Penyelenggaraan Undian”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, cet 24, Jakarta: PT, Pradnya Paramita, 1992.

Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad 1860 Nomor 3.

C. JURNAL :

Andi Mattalatta. “Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia.” Disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Kenotariatan angkatan 2008, Jakarta, 16 Agustus 2008.

Chairunnisa Said Selenggang. "Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia." Disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Jakarta, 16 Agustus 2008.

D. LAIN-LAIN

Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris

Bahan Kuliah Kode Etik Notaris

Bahan Kuliah Hukum Pajak

